

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT  
IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL  
PENGANGKUT IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA  
PERIKANAN (SIUP) OLEH NELAYAN DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Irmawati

NIM. 401.13.11.058

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT  
IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL  
PENGANGKUT IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA  
PERIKANAN (SIUP) OLEH NELAYAN DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN**

**SKRIPSI**

**Ditujukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Jurusan Ilmu Hukum-Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:  
Irmawati  
NIM. 401.13.11.058  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irmawati

N.I.M : 4011311058

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Oleh Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Irmawati

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
(SIKPI), SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) OLEH NELAYAN DI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

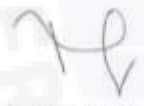
**SKRIPSI**

Oleh :

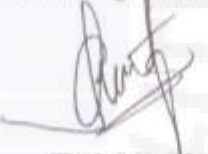
Irmawati  
NIM. 401.13.11.058  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

  
(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H)  
NIP.198317072012121004

Pembimbing Pendamping

  
(Toni, S.H., M.H)  
NP.608010028

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum

  
(Rio Vermanda Agustian)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN  
(SIKPI), SURAT IZIN USAHA PERIKANAN(SIUP) OLEH NELAYAN DI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

### SKRIPSI

Oleh :  
Irmawati  
NIM. 401.13.11.058  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 2 Agustus 2017

#### Majelis Penguji

- |               |  |  |
|---------------|--|--|
| 1. Ketua      | A.Fauzi Amiruddin, S.H., M.M<br>NP. 105206003        | (  ) |
| 2. Sekretaris | Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H<br>NIP. 198307172012121004 | (  ) |
| 3. Anggota    | Toni, S.H., M.H<br>NP. 608010028                     | (  ) |
| 4. Anggota    | Wirazilmustaan, S.H., M.H<br>NIP. 198809272014041001 | (  ) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Meme le temps st plus precieux que l’argent, alors ne jamais pas attendre”*

**Bahkan waktu lebih berharga dari uang, maka jangan pernah menunggu**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT Yang Maha Esa, mengabdikan dan memudahkan segala urusan penulis.
2. Kepada Bapak dan Ibuku, Syarif dan Marwati, terimakasih atas semua doa, bimbingan, kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang yang tidak terbatas. Semoga allah masukan kalian ke dalam surga tanpa hisab ..... Amin
3. Kepada aak dan bungsu kami, Siti Cholifah yang tahun lalu juga menyandang gelar sarjana, serta Ahmad Saiful yang sedang di pesantren yang telah membuat bangga Bapak dan Ibu dengan prestasinya, dan tidak pernah bosan mendoakan kedua orang tuanya dari jauh, terus lah membanggakan untuk kedua orangtua mu nong !!!
5. Kepada Susay Susanti Amstar yang selalu jadi moodboster walupun kadang sedikit petakilan, yang sering nemenin ke tempat-tempat yang bikin perut kenyang dan mood jadi kembali baik, Ku do'ain murah rejeki, enteng jodoh, sehat selalu, panjang umur.... Amin
6. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Nadia, Elfira Stefami, Ledy Warista, Karno dan Intan Permatasari yang tegabung dalam geng ANACONDA, Terimakasih atas kebersamaan baik selama ataupun diluar perkuliahan yang penuh canda tawa, tangis bahagia, tangis haru, Temenan kita harus awet yah !!
7. Kepada pimpinan dan exManager perusahaan tempat ku bekerja, Terimakasih untuk dukungan, pengertian dan rasa memaklumi yang sangat tinggi, serta rekan-rekan kerja yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
8. Kepada Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2013, selamat untuk pencapaian kalian dan kita semua, semoga menjadi bagian dari penegakan hukum yang amanah, dan jangan pernah tinggi hati, karna yang pintar akan kalah dengan yang beruntung.

## **ABSTRAK**

**IRMAWATI**

**4011311058**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT  
IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) OLEH  
NELAYAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN**

**Skripsi, Fakultas Hukum, 2017.**

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pelanggaran, Perikanan

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum yaitu penegak hukum yang salah satunya terdiri dari Kepolisian Perairan, TNI AL, serta wewenang pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP dan mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kepolisian Perairan serta pengawasan oleh Pengawas Perikanan sudah berjalan secara objektif dan sesuai dengan undang-undang. Dan faktor-faktor yang menghambat adalah sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain seperti sarana prasarana serta anggaran khusus pada instansi Kepolisian Perairan dan Pengawas Perikanan yang belum memadai.

## **ABSTRACT**

**IRMAWATI**

**4011311058**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATION FISHING LICENCE, FISH CARRIER LICENCE, FISHERIES BUSSINESS BY FISHERMAN LICENCE IN THE PROVINCE BANGKA BELITUNG ISLAND IN TERMS OF LAW NUMBER 45<sup>th</sup> IN 2009 ABOUT THE FISHERIES***

***Thesis, Faculty of Law, 2017.***

***Keyword : Law Enforcement, The Offence, Fisheries***

*Violation Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By Fisherman Licence it is a remedy which is done by the party who has the authority to do one of which consist of the Police Department's Waterways, Army Of Navy, as well as the authority of oversight by Department Of Marine and Fisheries. The purpose of this research is to know the law enforcement against violation of Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By Fisherman Licence and aware of the factors that effect law enforcement effort against in fringement of Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By Fisherman Licence. The type of research used empirical juridicial by using the method of approach to the sociology of law from the result of the research can be drawn the conclusion that law enforcement effort undertaken by the Police Department's Waterways, Army Of Navy, been running objectively and in accordance with the law and factors that inhibit is human resources and other supporting resources such as infrastructure as well as a special budget establishments of the Police Department's Waterways and authority of oversight by Department Of Marine and Fisheries that has not been adequately.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahir-rohmaanir-rohiim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Peengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Oleh Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dan meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membimbing, mengarahkan serta membuka cakrawal berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan sumbangsuhnya kepada penulis dengan saran, masukan, dan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Wirazilmustaan., S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah menjadi dosen pengampu beberapa mata kuliah yang penulis pelajari selama masa perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan penulis dalam Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bangka Belitung serta banyak memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menjadi yang lebih baik.
6. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bangka Belitung serta banyak memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menjadi yang lebih baik.
7. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang penulis banggakan, terima kasih telah memberikan pendidikan kepada penulis sehingga skripsi ini dibuat dan diselesaikan.
8. Kepada Bapak Sularsono selaku Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Jonathan selaku Penyidik Pembantu pada Dirut Kepolisian Perairan Pangkalbalam, Bapak Kristiatlizar selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Johan Murod selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Mirwan selaku Kepala

UPT.PPI Ketapang, Nelayan Desa Kurau, dan Nelayan Pangkalarang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi ini.

9. Kepada Orang Tua, Saudara Penulis serta Keluarga Besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selama 4 tahun menemani penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan juga telah banyak memberikan keceriaan, dukungan moral serta doa kepada penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, semoga sukses dalam hal apapun, amin.

#### 11. Almamaterku Tercinta UBB

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Pangkalpinang, 21 Agustus 2017

Penulis



Imawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16

### BAB II PENEGAKAN HUKUM, SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) DAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

A. Nelayan	
1. Pengertian Nelayan.....	18
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perikanan	

1. Ruang Lingkup Dan Sistematika Undang-Undang .....	20
C. Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Upaya Penegakan Hukum.....	31
D. Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan	
1. Pengertian, Tata Cara Perolehan dan Dasar Hukum Surat Izin Penangkapan Ikan.....	40
2. Pengertian, Tata Cara Perolehan dan Dasar Hukum Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.....	45
3. Pengertian, Tata Cara Perolehan dan Dasar Hukum Surat Izin Usaha Perikanan.....	49

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT  
IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL  
PENGANGKUT IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA  
PERIKANAN (SIUP) OLEH NELAYAN DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP Oleh Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	54
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP oleh Nelayan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	87

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**